

**IMPLIKASI PROGRAM “YES I DO” OLEH PLAN INTERNATIONAL
DALAM MENGURANGI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA (STUDI
KASUS KABUPATEN SUKABUMI)**

**Author : Loudy Indah Sukma
(email: loudy.indah0481@student.unri.ac.id)**

Pembimbing : Dr. Umi Oktyari R, MA

**Bibliografi : 11 Buku, 15 Jurnal, 17 Laporan, 31 Website, 3 Skripsi, 1
prosiding konferensi**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the highest rates of child marriage in the world. Seeing the adverse impact of child marriage, PLAN International and its partners run the "Yes I Do" program in Sukabumi Regency as one of the highest contributing districts of child marriage in Indonesia. This study will analyze how the program has implications for child marriage in Sukabumi Regency. This research uses qualitative methods and data collection techniques from documents such as official reports, books, international and national journals, news articles, and social media that answer the steps taken and their implications. Perspective of constructivism and Clive Archer's international organizational theory are used to analyze its implications both positive and negative. The results showed that the "Yes I Do" program by PLAN International had positive implications in reducing child marriage in Sukabumi Regency. The Yes I Do program makes the people of Sukabumi Regency turn into parents and young people who are more supportive of education than marrying underage. Although national statistics of child marriage have not decreased significantly, the Yes I Do program has established sustainable programs to reduce child marriage in Sukabumi Regency.

Keywords: Child Marriage, PLAN International, Yes I Do Program

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak (*Child Marriage*) merupakan isu global yang didorong oleh ketidaksetaraan gender (*gender inequality*), kemiskinan (*poverty*), kurangnya pendidikan (*lack of education*), norma dan praktik sosial yang salah (*harmful social norms and practices*), dan ketidakamanan (*insecurity*).¹ Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan maupun salah satu dari pasangan tersebut masih di bawah umur.

Perkawinan anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena secara langsung berdampak pada pendidikan, kesehatan, psikologis, dan anak-anak mereka. Perkawinan anak dikhawatirkan akan menghambat hak-hak anak dan menghentikan harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Selain itu, perkawinan anak dapat meningkatkan risiko depresi, kanker serviks, kematian ibu dan anak, penularan penyakit seksual, dan lainnya.

Perkawinan anak juga merupakan fenomena yang berdampak buruk pada beberapa aspek lain seperti aspek ekonomi dan sosial, dimana perkawinan anak seringkali berakhir pada perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak juga membawa tekanan ekonomi dan membatasi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau karir yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, berdasarkan konvensi hak anak pasal 1, anak adalah semua orang yang berusia di

bawah 18 tahun², sehingga anak yang menikah dibawah umur 18 tahun dapat dianggap sebagai pernikahan anak.

Selama dekade terakhir, kuantitas anak laki-laki dan pria telah menikah dibawah umur 18 tahun ialah sebanyak 115 juta dan kuantitas wanita yang menikah saat anak-anak secara global menurun sebesar 15%.³ Namun masih banyak anak-anak yang beresiko melakukan pernikahan dini tersebut terutama anak-anak yang tinggal di pedesaan dan berasal dari keluarga yang miskin.⁴

Berdasarkan data dari *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF), Afrika Barat dan Afrika Tengah memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi, dengan hampir 4 dari 10 wanita muda menikah sebelum usia 18 tahun. Afrika Timur dan Afrika Selatan (31%), Asia Selatan (28%), Amerika Latin dan Karibia (22%), serta Timur Tengah dan Afrika Utara (15%).⁵

Perkawinan anak juga merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak ke-8 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara.⁶ Indonesia telah melakukan berbagai

²UNICEF: "Konvensi Hak Anak", diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada 01 September 2021.

³UNICEF : "Child Marriage", diakses di <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> pada 03 November 2021.

⁴UNICEF : "Harmful Practices and Intimate Partner Violence", diakses dari <https://data.unicef.org/topic/gender/harmful-practices-and-intimate-partner-violence/> pada 01 September 2021.

⁵ Ibid.

⁶KOMPAS : "Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini Sitiasi Perkawinan Anak di Indonesia", diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia> pada 30 Oktober 2021.

¹GILRS NOT BRIDES: "About Child Marriage", diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/> pada 01 September 2021.

kebijakan untuk pemecahan masalah perkawinan anak terutama dari bidang hukum dan politik. Pada bidang hukum, Indonesia telah meratifikasi beberapa komitmen internasional dan nasional sebagai berikut⁷:

- 1) Konvensi Hak Anak, diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990
- 2) Konvensi CEDAW, diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1984 (Pasal 16 tentang Perkawinan)
- 3) International Convention On Civil And Political Rights, diratifikasi dengan UU No.12 tahun 2005
- 4) International Convention On Economic, Social And Cultural Rights, diratifikasi dengan UU No.11 Tahun 2005
- 5) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

Pada bidang politik, Indonesia membentuk komite nasional untuk memerangi perkawinan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Namun, kebijakan- kebijakan tersebut belum dapat mengurangi perkawinan anak di Indonesia di mana pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun dengan rata-rata 375 anak perempuan menikah setiap harinya⁸ dan 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum berumur 18 tahun.⁹

Tingginya perkawinan anak membuat organisasi yang fokus pada pemenuhan hak- hak anak seperti PLAN

International berjuang untuk menggagas program dan bekerjasama dengan beberapa pihak yang terkait seperti Rutgers World Population Foundation (WPF) Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LPAR), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) untuk mengurangi perkawinan anak di Indonesia khususnya Sukabumi.

PLAN International merupakan *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang didirikan oleh jurnalis Inggris John Langdon-Davies dan pekerja pengungsi Eric Muggeridge pada tahun 1937 dengan tujuan awal untuk menyediakan makanan, akomodasi dan pendidikan bagi anak-anak yang hidupnya telah terganggu oleh Perang Saudara Spanyol. Pada tahun 2020, PLAN International telah bekerja sama dengan 75 negara-negara di dunia¹⁰ termasuk di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan mengembangkan potensi mereka agar dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

PLAN International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 dan secara resmi berubah menjadi yayasan nasional bernama Yayasan PLAN International Indonesia (PLAN Indonesia) pada tahun 2017.¹¹ PLAN Indonesia memiliki visi untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak, agensi kaum muda, dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan.¹² Dalam mencapai visinya, PLAN Indonesia menggagas sebuah program yang disebut Yes I Do bersama dengan Rutgers WPF Indonesia dan mitra lokal maupun nasional lainnya.

⁷Sri Danti Anwar. KEMENPPPA : Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak, diakses dari <https://kajiangender.sksg.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-1-pembukaan-Sri-Danti-Anwar-1.pdf> pada 30 November 2021.

⁸ UNICEF. 2020. Laporan: Perkawinan Usia Anak di Indonesia.

⁹ UNICEF, BPS, PUSKAPA, Kementrian PPN/Bappenas, dan Universitas Indonesia. 2020. Laporan: Perkawinan Anak di Indonesia.

¹⁰PLAN International: "The Organization" diakses dari <https://PLAN-international.org/organisation> pada 06 Oktober 2021.

¹¹Yayasan PLAN International Indonesia: "Profil Kami" diakses di <https://PLAN-international.or.id/id/tentang-PLAN/#profil> pada 06 Oktober 2021.

¹²Yayasan PLAN International Indonesia: "Visi Misi" diakses di <https://PLAN-international.or.id/id/tentang-PLAN/#visi-misi> pada 06 Oktober 2021.

Rutgers WPF merupakan gabungan dari World Population Foundation dengan Rutgers Nisso. Penggabungan kedua organisasi ini terjadi karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menghapus kekerasan.¹³ Rutgers WPF Indonesia merupakan lembaga non-profit atau NGO yang bekerja di Indonesia sejak tahun 1997 untuk isu Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), serta pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS), salah satunya ialah perkawinan anak. Oleh sebab itu, Rutgers WPF Indonesia juga ikut berpartisipasi untuk menjalankan dan menggagas program Yes I Do bersama PLAN International.

Program Yes I Do dilaksanakan di tiga kabupaten Indonesia, yaitu Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat. Program ini berlangsung selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2016- 2020.¹⁴ Program Yes I Do bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, kehamilan remaja, dan praktik yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak perempuan.

Budi Kurniawan selaku manager program Yes I Do mengatakan bahwa program Yes I Do memiliki 5 pilar. Pertama, gerakan sosial berbasis komunitas, yang mana pilar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) yang tersebar di beberapa desa di Rembang, Sukabumi, dan Lombok Barat. Kedua, melibatkan kaum muda dalam berbagai forum atau kegiatan, seperti FAD (Forum Anak Desa). Ketiga, kemudahan akses anak perempuan kepada informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan diadakannya posyandu remaja. Keempat, memberikan pilihan kepada para remaja khususnya perempuan

lewat pendidikan formal dan non formal. Salah satu programnya ialah sekolah ramah anak. Kelima, mendorong kebijakan atau advokasi peraturan pemerintah baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat agar melahirkan aturan yang ramah terhadap anak perempuan dan berperan untuk terus melindungi anak-anak dari bahaya perkawinan anak.¹⁵

Perkawinan anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa aspek penentu, yaitu individu, rumah tangga, dan masyarakat.¹⁶ Aspek individu terjadi karena kurangnya informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi pada anak dan adanya perubahan tata nilai dan sosial di masyarakat seperti pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Aspek rumah tangga biasanya terjadi karena kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua. Kemudian aspek masyarakat terjadi karena adanya tradisi menikahkan anak (khususnya perempuan) di usia dini yang telah berlangsung sejak lama dengan alasan agar tidak menjadi perawan tua.

Di Jawa Barat, aspek individu dan rumah tangga menjadi faktor utama terjadinya perkawinan anak, di mana adanya kekhawatiran orang tua jika anaknya berzina dan adanya anggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat derajat keluarga jika menikahkan anaknya dengan keluarga yang status ekonominya lebih baik.¹⁷ Selain itu, adanya rasa bangga saat dapat menikah berkali-kali juga merupakan faktor terjadinya perkawinan

¹³Rutgers WPF Indonesia: “Siapa Kami” diakses di <https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/> pada 06 Oktober 2021.

¹⁴Rutgers WPF Indonesia : “Program Yes I Do”, diakses dari <https://rutgers.id/program/yes-i-do/> diakses pada 09 Oktober 2021.

¹⁵PLAN International, *Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak*, Katarana, Jakarta, 2021, hlm 14-17.

¹⁶ Mayang R. Joseph N. Fajar R. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia, in *Child Poverty and Social Protection Conference*, 2013, pp. 1–27.

¹⁷CNN Indonesia: “Melihat Lebih Lekat Pernikahan Anak di Jawa Barat” diakses di <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat> pada 12 Januari 2022.

anak di Jawa Barat meskipun pemikiran tersebut sudah berangsur-angsur hilang.

Dari hasil penelitian Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam pernikahan usia dini di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, di Jawa Barat, empat dari lima kecamatan dengan angka pernikahan anak yang tinggi berada di Kabupaten Sukabumi. Namun, angka prevalensi aktual di wilayah tersebut adalah 18% lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 23%. Artinya, hanya 4 dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang rata-rata memiliki 2 dari 5 anak di bawah usia 18 tahun yang sudah menikah atau pernah menikah.¹⁸ Oleh sebab itu, pada penelitian ini, penulis akan membahas implikasi program “Yes I Do” di Sukabumi yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi.

Program “Yes I Do” diresmikan di Kabupaten Sukabumi oleh Wakil Bupati Sukabumi Drs. H. Adjo Sardjono, M.M sebagai bentuk pentingnya sinergi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi. Yani Marwan Hamami sebagai istri Bupati Sukabumi juga menyatakan bahwa Sukabumi mendukung program “Yes I Do” melalui kolaborasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Sukabumi.¹⁹

Rumusan Masalah

Pernikahan dini merupakan isu yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan dini menyebabkan anak menjadi putus sekolah,

instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan sehingga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologi. PLAN International sebagai organisasi internasional yang hadir untuk memperjuangkan hak anak-anak bekerja sama dengan Rutgers WPF Indonesia dan lembaga lainnya menggagas program Yes I Do untuk mengurangi perkawinan anak di beberapa kabupaten di Indonesia salah satunya Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu **“Bagaimana implikasi program “Yes I Do” oleh PLAN International dalam mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi?”**

2. Kerangka Teoritis

Perspektif : PLURALISME

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini ialah **Perspektif Pluralisme**. Pluralisme menganggap bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang berperan, aktor non negara juga memiliki peran yang penting dalam sistem internasional.²⁰

Menurut Andrew Heywood, Ada dua cara untuk menjelaskan pluralisme, yaitu secara luas dan sempit. Dalam artian luas, pluralisme didefinisikan sebagai perspektif yang menyakini adanya keragaman seperti keberagaman budaya, keberagaman politik, dan keberagaman moral. Sedangkan dalam artian sempit, pluralisme didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan distribusi dari kekuatan politik atau *political power*.²¹

Adapun asumsi- asumsi dasar pluralisme ialah sebagai berikut:

¹⁸Ibid.

¹⁹ Rutgers WPF Indonesia: “Mengurangi Angka Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja dan Sunat Perempuan di Kabupaten Sukabumi”, diakses di <https://rutgers.id/2018/04/10/mengurangi-angka-perkawinan-anak-kehamilan-remaja-dan-sunat-perempuan-di-kabupaten-sukabumi/> pada 15 Juni 2022.

²⁰ M. Saeri, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan paragdimatik*. Jurnal Transnasional. Vol. 3 No.2 (2012), hlm 15.

²¹ Andrew Heywood. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan, hlm.82

- a. Aktor non negara ialah entitas yang penting dalam hubungan internasional
- b. Negara bukan aktor tunggal
- c. Negara bukan aktor rasional
- d. Mendukung agenda yang lebih luas dari politik internasional.

Aktor non-negara kini semakin memainkan peran penting dalam sistem internasional. Aktor non-negara datang dalam berbagai bentuk, seperti organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan multinasional, kelompok kepentingan, dan bahkan individu. Hal ini menciptakan jaringan lintas negara yang memperkuat peran aktor dalam mempengaruhi dinamisme hubungan internasional melalui pengaruh mereka.

Banyak faktor penting yang membentuk negara sebagai aktor penting, tetapi pluralisme percaya bahwa keputusan setiap negara adalah produk lobi dari berbagai pemangku kepentingan. Karena ada proses lobi tersebut, negara tidak bisa dianggap sebagai aktor rasional.

Tulisan ini menggunakan perspektif pluralism karena pemecahan permasalahan perkawinan anak di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga aktor non-pemerintah seperti organisasi internasional non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah yang digunakan dalam tulisan ini ialah PLAN International. PLAN International merupakan organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk memenuhi hak anak salah satunya ialah melawan praktik berbahaya seperti perkawinan anak.

1.5.1. Level Analisis: Kelompok

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu tingkat analisa yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood, yaitu perilaku kelompok. Tingkat analisa perilaku kelompok berasumsi bahwa peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh

kelompok kecil, organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya.²² Dengan demikian, PLAN International sebagai organisasi internasional merupakan salah satu penentu dari peristiwa internasional yang dimaksud oleh tingkat analisa perilaku kelompok tersebut.

1.5.2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai sistem yang tetap yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerja sama antara para anggotanya.²³ Menurut Clive Archer, organisasi internasional terdiri dari organisasi yang bergerak dibawah pemerintah (IGO) dan organisasi tanpa campur tangan pemerintah (INGO) tujuan dan aktivitas organisasi internasional tercantum pada dokumen awal saat organisasi didirikan dan aktivitas merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Struktur organisasi internasional dapat diklasifikasikan melalui *institutional power of members, member states/institutions, governmental/ non-governmental*.²⁴ Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa organisasi internasional memiliki klasifikasi yang dapat dilihat dari keanggotaannya, tujuannya, dan strukturnya.

Berdasarkan pemaparan klasifikasi diatas, maka organisasi internasional dalam penelitian ini ialah PLAN International yang termasuk dalam *International Non-Governmental Organization* (INGO). PLAN International

²²Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 41.

²³Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatatnusa, Jakarta, 2001, hlm 1.

²⁴Clive Archer, *Internasional Organizations Third Edition*, Taylor & Francis e-Library, New York, 2001, hlm 35- 62.

memiliki tujuan untuk membawa perubahan pada kehidupan anak-anak yang membutuhkan sehingga konsep organisasi internasional dalam penelitian ini berguna untuk menganalisis program “Yes I Do” yang dilakukan oleh PLAN International untuk mengurangi perkawinan anak di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi. Menurut Archer, fungsi organisasi internasional dapat dibagi menjadi 9 fungsi, yaitu:

1) Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen bagi suatu negara untuk mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingannya.

2) Norma

Organisasi internasional memainkan peran penting di lembaga-lembaga di dunia karena telah membantu menciptakan norma-norma dalam hubungan internasional.

3) Rekrutmen

Organisasi internasional memiliki fungsi penting dalam perekrutan peserta dalam sistem politik internasional. Namun, PLAN Internasional tidak menjalankan fungsi rekrutmen dikarenakan PLAN Internasional tidak melakukan perekrutan pada anggotanya.

4) Sosialisasi

PLAN International sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemenuhan hak anak dan kaum muda melakukan sosialisasi untuk program-program yang dijalankannya agar dapat menjangkau masyarakat luas.

5) Pembuat Peraturan

Dengan tidak adanya pemerintahan dunia dalam sistem internasional, pengambilan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktik masa lalu atau perjanjian organisasi internasional.

6) Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional diserahkan kepada kedaulatan Negara karena pelaksanaan sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7) Pengesahan Peraturan

Di dalam negara, ajudikasi aturan biasanya dilakukan oleh pengadilan. Tetapi pada sistem internasional, organisasi internasional yang bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan.

8) Informasi

PLAN International tidak menjalankan fungsi informasi dikarenakan PLAN International tidak mengadakan pertemuan dengan anggota organisasi untuk membahas masalah tertentu.

9) Operasional

Organisasi internasional melakukan sejumlah fungsi operasional, sama seperti pemerintah.

3. METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menjelaskan implikasi program Yes I Do oleh PLAN International yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dan informasi yang dikumpulkan berupa fakta yang mana dikumpulkan secara apa adanya tanpa dikurangi maupun dilebihkan. Pengumpulan data bertujuan memperoleh informasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Terdapat 2 jenis data pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa laporan dan lainnya. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung berupa buku, artikel, situs internet dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan

menganalisis data primer maupun sekunder.

4. HASIL DAN PENELITIAN

A. Sosialisasi

Clive Archer menjelaskan bahwa di dalam suatu negara, sosialisasi dilakukan oleh sejumlah instansi yang bertujuan untuk menanamkan norma yang berlaku di instansi-instansi tersebut.²⁵ Di Indonesia, salah satu instansi yang melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma ialah PLAN International Indonesia.

Fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh PLAN International merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam menjalankan program Yes I Do di Kabupaten Sukabumi. Pada studi *baseline*, ditemukan bahwa masyarakat Sukabumi memandang bahwa perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari zina. Dengan adanya sosialisasi terhadap dampak perkawinan anak yang dilakukan oleh PLAN International Indonesia melalui program Yes I Do membuat masyarakat Kabupaten Sukabumi berubah menjadi orang tua yang lebih mendukung pendidikan anak-anak mereka, daripada menikahkan mereka di bawah umur.²⁶ PLAN International Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat Sukabumi dan juga lembaga-lembaga lokal mengenai perkawinan anak. hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya perempuan mengetahui dampak yang disebabkan oleh perkawinan anak sehingga menimbulkan kesadaran untuk tidak menikah maupun menikahkan anak saat usia anak. Dengan adanya sosialisasi,

masyarakat diharapkan dapat memahami dan mendukung untuk melawan praktik berbahaya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, dengan melakukan sosialisasi, PLAN International Indonesia akan dikenal sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak, agensi kaum muda, dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan. PLAN International Indonesia melakukan sosialisasi di berbagai tingkat seperti tingkat desa maupun daerah dengan melalui media cetak maupun media online dengan masyarakat dan pemerintah sebagai sasaran pembacanya.

1. Media Cetak

Salah satu media yang digunakan oleh PLAN International Indonesia untuk melakukan sosialisasi ialah media cetak. Media cetak yang digunakan dapat berupa buku foto maupun *policy brief*. *Policy brief* merupakan naskah singkat yang berisi hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan untuk meyakinkan *policy maker* agar mengadopsi alternatif solusi yang ditawarkan. Sedangkan buku foto merupakan buku yang berisi foto-foto dan dapat memiliki atau tidak memiliki tulisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target *policy brief* adalah *policy maker* dan target buku foto adalah masyarakat umum.

Buku foto tersebut berisi foto-foto yang membahas tentang tradisi pernikahan yang telah mengalami pergeseran makna ke arah negatif, seperti tradisi Suku Sasak, yaitu Merarik. Buku foto tersebut juga membahas tentang kampanye dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada 5 (lima) pilar program Yes I Do untuk memutus rantai perkawinan anak.

Policy brief diatas membahas tentang kondisi perkawinan anak di Indonesia setelah revisi UU 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

²⁵ Clive Archer. Op. cit, hlm 99.

²⁶ Yes I Do. 2020. Endline Report. Loc.cit

mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Policy brief* ini menganalisis berbagai penyebab perkawinan usia anak, tren kenaikan angka dispensasi kawin, serta berbagai modus pelaksanaan perkawinan usia anak berdasarkan temuan riset Plan Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia. *Policy brief* ini juga memberikan rekomendasi strategi pencegahan perkawinan usia anak.²⁷

2. Media Online

Media online merupakan media sosialisasi yang kerap kali digunakan oleh PLAN International Indonesia untuk menggait lebih banyak pembaca. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sosial media yang sering PLAN International Indonesia manfaatkan untuk mensosialisasikan kampanye maupun kegiatannya, seperti Instagram, YouTube, Twitter serta situs web.

PLAN International Indonesia menggunakan media sosial untuk menyampaikan kepentingannya secara online agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Hal tersebut dikarenakan aksesibilitas media sosial sudah sangat luas, sehingga akan lebih mudah diakses daripada media offline.

Akun Instagram PLAN International Indonesia sering digunakan untuk berbagi informasi tentang topik yang PLAN International Indonesia angkat, seperti topik kesehatan dan reproduksi seksual, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pertumbuhan anak. Konten-konten yang dimuat di Instagram PLAN International Indonesia dikemas dengan semenarik mungkin agar dapat menjadi daya tarik bagi para audiens Instagram PLAN International Indonesia.

PLAN International Indonesia memiliki lebih dari 72.000 pengikut di akun Instagramnya, sehingga setiap konten

yang diunggah oleh PLAN International Indonesia dilihat ratusan bahkan ribuan orang. PLAN International Indonesia memanfaatkan media online dengan sebaik-baiknya agar upaya yang dilakukannya tidak hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan atau dengan tatap muka.

Selain Instagram, PLAN International Indonesia juga melakukan sosialisasi di akun YouTube-nya, yang diberi nama Plan Indonesia Official Channel. Di YouTube, PLAN International Indonesia memiliki lebih dari 8.000 *subscribers*. Namun, penonton dari unggahannya hanya mencapai puluhan orang terutama saat PLAN International Indonesia melakukan siaran langsung pada kegiatan webinar. Hal tersebut terjadi karena orang-orang cenderung menghadiri webinar saat webinar berlangsung melalui *platform* yang digunakan dari pada menonton siaran langsungnya.

Pada tahun 2020, PLAN International Indonesia bekerjasama dengan Pasar Malam Films mempersembahkan sebuah *short movie* yang berjudul “Suara Kirana” di akun YouTube-nya. Film pendek tersebut berlatar tempat di Sukabumi dan merupakan salah satu bentuk sosialisasi dampak perkawinan anak dari program Yes I Do.

Tidak jauh berbeda dengan YouTube, Twitter PLAN International Indonesia memiliki 5.585 pengikut dan tidak begitu aktif sehingga tidak terjadinya komunikasi dua arah. Meskipun begitu, konten yang diunggah PLAN International Indonesia dapat tersebar semakin luas karena *retweet* yang dilakukan oleh audiens.

Selain melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak dan online, PLAN International Indonesia juga bersosialisasi dengan melakukan berbagai kegiatan seperti gerak jalan tingkat daerah dan melakukan siaran radio yang mana

²⁷ Yayasan PLAN International Indonesia. 2021. *Policy Brief: Strategi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak: Kajian Pasca Revisi UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan*.

telah menjangkau 1,5 juta orang ditingkat desa maupun nasional, serta terbentuknya diskusi berseri yang telah diikuti oleh 743 masyarakat yang terdiri dari 153 laki-laki dewasa, 198 perempuan dewasa, 160 remaja laki-laki, dan 232 remaja perempuan.²⁸

B. Norma

Sebagai sebuah organisasi internasional, PLAN International pastinya memiliki norma yang ingin mereka sebarkan sebagaimana ungkapan Archer yang menyatakan bahwa organisasi internasional telah memainkan peran penting dalam sistem internasional karena telah membantu menciptakan norma-norma dalam hubungan internasional.²⁹ Dalam hal ini, PLAN International membawa norma untuk pemenuhan hak anak, agensi kaum muda, dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan, salah satunya ialah dengan mengurangi bahkan menghapuskan praktik berbahaya perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu norma berbahaya yang masih umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di Kabupaten Sukabumi. Perkawinan anak disebut sebagai praktik berbahaya karena akan menimbulkan masalah sosial lainnya yang tidak hanya akan dirasakan oleh para pelaku perkawinan anak tetapi juga masyarakat dan Negara.

Oleh sebab itu, PLAN International berjuang untuk mengubah norma dan pemahaman yang berlaku di masyarakat mengenai perkawinan usia anak. PLAN International Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai hal, seperti melakukan sosialisasi secara online maupun offline, mengadvokasi kebijakan pemerintah, mengadakan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan ekonomi

dan diskusi, serta menciptakan pendidikan ramah anak.

Saat pertama kali memulai perjuangannya, PLAN International Indonesia pastinya menghadapi berbagai tantangan, terutama penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa perkawinan usia anak merupakan sesuatu yang normal terjadi.³⁰

Tidak hanya masyarakat, tokoh agama juga menjadi penghambat pelaksanaan program Yes I Do di Kabupaten Sukabumi. Tokoh agama masih memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan hal yang baik untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina.³¹

Meskipun menghadapi banyak tantangan, PLAN International Indonesia berhasil mengubah pandangan dan norma yang berlaku di masyarakat terkait perkawinan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari berhasilnya PLAN International Indonesia mengadvokasi kebijakan pemerintah, salah satunya ialah dialokasikannya dana desa untuk mendukung kegiatan pencegahan perkawinan anak dengan membentuk 6 SMPN dan 2 MTs ramah anak, serta diskusi berseri yang telah diikuti oleh 743 masyarakat.

Di sekolah-sekolah, program Yes I Do memberikan pendidikan mengenai hak-hak seksual dan reproduksi dengan menggunakan modul yang disebut modul SETARA. Guru disekolah juga telah membuat penyesuaian pada topik pacaran sehat di modul tersebut karena bertentangan dengan anjuran guru agar siswa tidak boleh berpacaran. Program Yes

²⁸ PLAN International Indonesia. 2020. Laporan Project Yes I Do (2017-2020) oleh PLAN International Indonesia Kabupaten Sukabumi, hlm 5

²⁹ Clive Archer. Op.cit, hlm 98

³⁰ Yayasan PLAN International Indonesia: "Perjuangan Keikhlasan", diakses di <https://plan-international.or.id/id/perjuangan-keikhlasan/> pada 08 April 2022.

³¹ Yes I Do. 2018. Midline Report: Situasi Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, dan Sunat Perempuan di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat, hlm 20

I Do juga melatih siswa untuk menjadi pendidik sebaya yang mampu memberikan informasi mengenai hak-hak seksual dan reproduksi di sekolah maupun lingkungannya.³²

C. Operasional

PLAN International Indonesia juga menjalankan fungsi operasional dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan dalam segala aspek kehidupan mereka, seperti aspek kesehatan seksual dan reproduksi remaja, ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda, *girls leadership academy*, perlindungan dan tumbuh kembang anak, serta ketahanan masyarakat dan respons kemanusiaan.

Saat melaksanakan program Yes I Do di Sukabumi, PLAN International Indonesia dan mitranya melakukan studi *base-*, *mid-*, dan *endline*. Studi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui kenapa dan bagaimana strategi intervensi program Yes I Do berkontribusi atau tidak berkontribusi pada hasil yang lebih baik terkait dengan lima tujuan strategis Yes I Do.

Studi tersebut juga bertujuan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan benar-benar mengurangi perkawinan anak di Sukabumi. Studi *baseline* dilaksanakan pada tahun 2016, studi *midline* dilaksanakan setelah 2,5 tahun pelaksanaan program Yes I Do, dan studi *endline* dilakukan pada tahun 2020 untuk mengetahui pencapaian dari 5 tujuan strategis program Yes I Do.

Sejak 2016, PLAN International Indonesia melalui program Yes I Do berjuang untuk mencegah perkawinan anak dan mendorong kaum muda agar dapat memutuskan kehidupan mereka sendiri. Dengan bantuan para mitra dan aliansinya, PLAN International Indonesia berhasil membentuk 4 Kelompok

Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Sukabumi. KPAD berperan dalam pencegahan, pendampingan, serta penanganan kasus perkawinan anak dengan merujuk ke sistem pelayanan yang ada. KPAD terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, perwakilan anak, dan remaja desa.

Sejak 2017, KPAD telah memiliki 140 anggota yang terdiri dari 8 anak laki-laki, 11 anak perempuan, 1 kaum muda laki-laki, 5 kaum muda perempuan, 56 dewasa laki-laki, dan 58 dewasa perempuan. Kemudian, selama program Yes I Do berjalan, KPAD Sukabumi menerima 41 kasus kekerasan dan 26 (63%) diantaranya ialah kasus perkawinan anak.³³

Selain terbentuknya KPAD, PLAN International juga membantu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Forum Anak Desa (FAD). FAD berperan dalam penyelenggaraan kegiatan terkait HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) bagi anak dan remaja. Salah satu program FAD ialah mengajak para remaja terutama perempuan untuk aktif menentukan jalan hidup mereka ke arah positif.

Agar para remaja menjalani hidup yang positif, PLAN International Indonesia melalui program Yes I Do menciptakan kegiatan pemberdayaan ekonomi (kewirausahaan dan bisnis). Di Sukabumi, 1164 remaja telah mendapatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi berupa kelas rutin, loka karya, dan pelatihan kewirausahaan. Kemudian, 552 orang dewasa telah menerima kapasitas kewirausahaan berupa pelatihan, loka karya, serta pertemuan dengan pemerintah dan pelaku usaha terkait. Tidak hanya itu, selama program Yes I Do berlangsung, telah terbentuk kelompok bisnis remaja dengan omset sekitar Rp.600.000/bulan.³⁴

³³ PLAN International Indonesia. 2020. Laporan Project Yes I Do (2017-2020) oleh PLAN International Indonesia Kabupaten Sukabumi. Op.cit, hlm 5

³⁴ Ibid

³² Ibid, hlm 86

Untuk remaja yang putus sekolah, Yes I Do melalui mitranya PUPUK (perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil) bekerjasama dengan PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) Nusantara untuk mendukung mereka yang putus sekolah agar melanjutkan pendidikannya. Program Yes I Do dan PKBM Nusantara menyediakan pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan keterampilan remaja seperti salon dan kelas merias. Di Sukabumi, telah dibentuk 4 PKBM.³⁵

Bagi kaum muda, PKBM telah menjadi salah satu alternatif untuk melanjutkan pendidikan mereka. Namun, tidak diketahui apakah pendidikan PKBM memiliki kualitas yang cukup bagi kaum muda. Kemudian, perlunya menyelidiki rintangan yang dihadapi remaja dalam mengikuti PKBM, serta hambatan yang dihadapi PKBM dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.

Kemudian, PUPUK juga menjalin kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kerjasama tersebut akan membuka peluang kerja bagi pelajar putus sekolah yang telah lulus dari PKBM dengan melaksanakan pelatihan vokasional. Dengan dibentuknya sekolah dan kegiatan- kegiatan yang sedemikian rupa, diharapkan pendekatan norma terkait perkawinan pada usia anak di Sukabumi dapat terlaksana dengan lebih maksimal dan mencapai lebih banyak orang.

Untuk mendapatkan akses dan ketersediaan layanan HKSR bagi remaja, Yes I Do membentuk posyandu remaja salah satunya terdapat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja. Posyandu remaja di Desa Sukaraja bukanlah posyandu yang baru dibentuk tetapi adanya penambahan tugas pelayanan pada posyandu yang telah ada. Pada posyandu remaja, remaja yang datang akan diberikan layanan konsultasi sesuai dengan kebutuhannya.³⁶ Meskipun telah berkontribusi dalam memberikan pengetahuan mengenai HKSR terhadap

remaja, posyandu remaja belum berjalan secara efektif karena kurangnya pendampingan dan kapasitas bangunan.

Saat PLAN International Indonesia mengadakan pertemuan Laporan Program dan Diskusi Kelanjutan Program Yes I Do pada tahun 2020, H. Adjo Sardjono selaku wakil bupati Sukabumi menyatakan bahwa program Yes I Do merupakan salah satu penyumbang terpenuhinya indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sukabumi. Ia juga berharap program Yes I Do dapat terus berlanjut untuk mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi sebagai wujud mencapai target SDGs 2030.³⁷

D. Pembuatan Kebijakan

Upaya advokasi kebijakan terkait perlindungan anak di Sukabumi sudah dilakukan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, beberapa dinas seperti Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPPKB, berkolaborasi untuk membuat rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan anak. Usulan perda tentang perlindungan anak ini disampaikan pada tahun 2016 kepada Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk dipertimbangkan. Namun, usulan perda tentang perlindungan anak tersebut tidak masuk dalam Prolegda 2016.³⁸

Oleh sebab itu, Program Yes I Do bekerja di Sukabumi pada tahun 2016 untuk mengawal rencana daerah untuk perlindungan anak agar dapat dibahas dalam Prolegda 2017. Akhirnya pada awal tahun 2018, rancangan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan anak disahkan dengan salah

³⁵ Yes I Do. 2018. Midline Report. Op.cit, hlm 53

³⁶ Yes I Do. 2018. Midline Report. Op.cit, hlm 51

³⁷ Pemerintah Kabupaten Sukabumi: "WABUP ; PROGRAM YES I DO, PENUHI INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK", diakses di <https://sukabumikab.go.id/web/b/3046.asp> pada 14 April 2022.

³⁸ Yes I Do. 2018. Midline Report. Op.cit, hlm 59

satu klausulnya membahas mengenai pernikahan anak.³⁹

Tidak hanya itu, selama program Yes I Do dilaksanakan di Sukabumi, PLAN International Indonesia mengadvokasi kebijakan-kebijakan di tingkat desa, kabupaten serta daerah. Mengadvokasi kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan strategis dari program Yes I Do, yaitu pembuat kebijakan dan pengemban tugas membangun dan melaksanakan hukum serta peraturan terkait perkawinan anak, kehamilan remaja, dan sunat perempuan.

Beberapa kebijakan dan inisiatif yang lahir disebabkan advokasi dari PLAN International Indonesia melalui program Yes I Do dapat dilihat sebagai berikut:

- ✓ Surat Keputusan Desa mengenai KPAD.
- ✓ Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mengenai pembentukan dan pengembangan sekolah dan madrasah ramah anak.
- ✓ Surat Edaaran Kepala Desa.
- ✓ Surat Keputusan Pembentukan tim sekolah ramah anak dan PKBM ramah anak.
- ✓ Dukungan anggaran untuk KPAD dari pemerintah desa. Dengan adanya dukungan ini, diberikan sebesar Rp 53.000.000.00 untuk 3 desa di Sukabumi sejak tahun 2017.
- ✓ Deklarasi Forum Anak Desa melawan perkawinan usia anak.
- ✓ Surat Edaran Kepala Desa mengenai sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak.
- ✓ Inisiatif sekolah dampingan untuk mengadakan ekstrakurikuler kewirausahaan.

Secara umum, sejak penelitian *baseline*, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan desa sebagai hasil dari advokasi program Yes I Do. Tantangan utama

program Yes I Do berikutnya adalah memastikan bahwa produk kebijakan diterapkan secara memadai sehingga benar-benar dapat membantu anak-anak.

E. Penerapan Kebijakan

Setelah mengadvokasi berbagai kebijakan untuk memenuhi hak anak-anak, PLAN International melalui program Yes I Do membuat berbagai program kerja untuk memastikan bahwa produk kebijakan diterapkan secara memadai sehingga benar-benar dapat membantu anak-anak. PLAN International Indonesia membentuk program-program yang melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, masyarakat, guru, remaja, serta tenaga kesehatan.

PLAN International Indonesia membuat program pada beberapa aspek seperti aspek pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dengan mendukung program KLA yang diimplementasikan oleh DP3A, pengembangan kelompok wirausaha untuk kaum muda, dan lainnya. Kemudian aspek hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan memberikan pengetahuan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah menggunakan modul SETARA, dan lain sebagainya. Selain itu, PLAN International juga membuat program yang melibatkan remaja seperti KPAD, FAD, posyandu remaja, dan PKBM.

Dijalankannya program kerja yang dilakukan oleh program Yes I Do berhasil menurunkan persentase perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi. Di Sukabumi, perempuan berusia 18-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun menurun dari 18% pada studi *baseline* menjadi 9% pada studi *endline*. Sedangkan laki-laki berusia 18-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun

³⁹ Ibid

menurun dari 0,5% pada studi *baseline* menjadi 0% di studi *endline*.⁴⁰

F. Agregasi dan Artikulasi

Sebagai organisasi yang bergerak pada bidang kemanusiaan, PLAN International menjadi instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan para anggotanya seperti yang dikatakan Archer bahwa organisasi non-pemerintah itu menjadi instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan para anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya program Yes I Do di beberapa Negara, seperti Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambik, Pakistan, Zambia, dan Indonesia agar terciptanya dunia yang lebih baik dengan memastikan semua anak dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.

Program Yes I Do di Indonesia juga menjadi Instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan berbagai pihak. PLAN International Indonesia beraliansi dengan Rutgers WPF Indonesia dan ARI (Aliansi Remaja Independen) menjalankan program Yes I Do dengan bantuan dan dukungan dari berbagai jaringan kerja, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Agensi UN (UNFPA dan UNICEF), Pusat Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kantor Urusan Agama, Badan Penasihat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pengadilan Agama, Kepolisian, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat desa, masyarakat, serta kaum muda.⁴¹

Selain itu, menurunnya prevalensi perkawinan anak di Sukabumi juga didukung oleh upaya semua pihak untuk mengintervensi proses perkawinan anak. Pihak-pihak yang disebutkan berusaha mencegah perkawinan anak adalah pejabat pemerintah (61%), tokoh masyarakat (39%) dan lainnya, termasuk keluarga, KPAD, program Yes I Do dan Posyandu pemuda (39%).⁴²

G. Pengesahan Kebijakan

PLAN International Indonesia tidak menjalankan fungsi pengesahan kebijakan. Umumnya, yang bertanggung jawab atas pengesahan aturan di dalam suatu Negara ialah badan peradilan, seperti pengadilan hukum, panel arbitrase, pengadilan, dan sebagainya.

H. Informasi

Sebagai organisasi internasional, PLAN International Indonesia tidak melakukan fungsi informasi. Hal tersebut dikarenakan PLAN International Indonesia tidak melakukan pertemuan dengan para anggotanya, sedangkan Archer menyatakan bahwa organisasi internasional dapat melaksanakan fungsi informasi jika organisasi tersebut melakukan pertemuan dengan para anggotanya untuk membahas mengenai isu tertentu.⁴³

⁴⁰ Yes I Do. 2020. Endline Report. Op.cit, hlm 57

⁴¹ Rutgers WPF Indonesia : “Program Yes I Do”. Loc.cit

⁴² Yes I Do. 2020. Endline Report. Op.cit, hlm 68

⁴³ Clive Archer. Op. cit, hlm 107.

I. Rekrutmen

Selain tidak menjalankan fungsi informasi, PLAN International Indonesia juga tidak menjalankan fungsi rekrutmen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PLAN International Indonesia tidak merekrut anggota; sebaliknya, ia bekerja sama dengan organisasi lain, baik lembaga- lembaga lokal maupun organisasi internasional. Sementara Archer menyatakan bahwa suatu organisasi dapat mencapai fungsi ini jika telah memenuhi perannya merekrut anggota baru.⁴⁴

5. SIMPULAN

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi setelah Kamboja. Perkawinan anak merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks di Indonesia karena perkawinan anak berdampak pada berbagai isu lain seperti *stunting*, kemiskinan, tingginya kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka putus sekolah, dan penurunan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Dalam kurun waktu 10 tahun (2008-2018), perkawinan usia anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5%, namun penurunan tersebut tergolong lambat sehingga belum mencapai hasil yang diharapkan. Kenaikan pada jumlah pernikahan anak menunjukkan bahwa upaya yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi angka pernikahan anak.

Pemerintah Indonesia mendukung semua upaya untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diwakili dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman. Target ini dijabarkan dalam bentuk lebih konkret, yaitu penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bekerjasama dengan berbagai kalangan, seperti masyarakat, media, universitas lokal dan internasional, serta organisasi-organisasi non-pemerintah seperti PLAN International Indonesia. Program Yes I Do yang digagas oleh PLAN International Indonesia dan mitra lainnya ialah salah satu contoh inisiatif untuk mencapai target tersebut.

PLAN International dan mitranya menjalankan program Yes I Do di 3 Kabupaten Indonesia, yaitu Kabupaten Sukabumi, Lombok Barat dan Rembang. Program Yes I Do adalah aliansi strategis dari lima organisasi yang berbasis di Belanda yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ruang pengambilan keputusan kaum muda tentang apakah, kapan dan siapa yang harus dinikahi serta jika, kapan dan dengan siapa harus memiliki anak. Tulisan ini hanya akan membahas program Yes I Do di Kabupaten Sukabumi karena Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 273.300 pada tahun 2018. Umumnya, faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di Sukabumi ialah faktor sosial dan kesehatan seperti kehamilan yang tidak diinginkan akibat gaya berpacaran yang beresiko, faktor agama seperti kekhawatiran orang tua terhadap zina, dan faktor budaya seperti perjodohan yang terjadi berdasarkan pada pertimbangan ekonomi dan agama (ta'aruf- mengenal satu sama lain sebelum melakukan pernikahan dalam Islam) pelamar.

⁴⁴ Clive Archer. Op. cit, hlm 98.

Implikasi program Yes I Do oleh PLAN International di Kabupaten Sukabumi akan dilihat berdasarkan 9 (sembilan) fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip dari buku *International Organizations*. Fungsi yang dijalankan oleh PLAN International hanya terdapat 6 (enam) fungsi, yaitu sosialisasi, norma, operasional, agregasi dan artikulasi, pembuatan kebijakan, dan penerapan kebijakan. Tiga fungsi organisasi internasional yang tidak dilaksanakan oleh PLAN International ialah pengesahan kebijakan, rekrutmen dan informasi.

Penelitian ini telah memaparkan implikasi dari program Yes I Do yang dilaksanakan Oleh PLAN International, aliansi dan mitranya dalam mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan teori organisasi internasional. Penelitian ini menemukan bahwa program Yes I Do berimplikasi pada penurunan perkawinan anak di Sukabumi di mana perempuan berusia 18-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun menurun dari 18% menjadi 9%, sedangkan laki-laki berusia 18-24 tahun yang menikah di usia kurang dari 18 tahun menurun dari 0,5% pada menjadi 0%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrew Heywood. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Archer, Clive. 2001. *Internasional Organizations Third Edition*. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Jackson, Robert, dan George Sorensen. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony Cooperation and*
- Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- McGlinchey, Stephan, dkk. 2020. *International Relations Theory*. Terjemahan Takdir Ali Mukti, Yogyakarta: E-International Relations Publishing
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- PLAN Internatuional. 2021. *Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak*. Jakarta: Katarana.
- Steans, Jill dan Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Terjemahan oleh Deasy Silvy Sari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2001. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatatnusa.

Jurnal

- Ali, Surmiati. 2015. *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No.10, hlm 1-28
- Ardiyanti, Dwi. 2016. *Kebudayaan dan Perannya dalam Pembentukan Moral Menurut Perspektif Konstruktivis*. Jurnal PIR. Vol. 1 No. 1, hlm 37-50
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pediatri, Vol.11 No. 2, hlm 136-140
- Grijns, Mies, dkk. 2016. *Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan*. Vol. 21 No. 1, hlm 9-33.
- Hanafi, Yusuf dan Nur Atikah. 2014. *Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy And Action Untuk*

- Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 6 No. 2, hlm 140-148
- Inayati, Inna Noor. 2015. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, Vol. 1 No.1, hlm 46-53
- PLAN International. 2020. Engaging Girls, Boys, dan Youth as Active Citizen. PLAN International Position Paper, hlm 2-57
- Kartikawati, Reni. 2014. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1, hlm 1-16
- Milner, Helen. 1992. International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses. *World Politics*, Vol. 44 No. 3, hlm 466-496
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No. 2, hlm 386-411
- Nour, Nawal M. 2009. Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, Vol. 2 No.1, hlm 51-56
- P, David Forsythe. 2017. Human Rights in International Relations, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1, hlm 166-173
- Saeri. M. 2012. Teori Hubungan Internasional Sebuah pendekatan Paradigmatik, *Jurnal Transnasional*, Vol.3 No.2, hlm 1-19.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, *Jurnal SOCIAL WORK*, Vol. 1 No. 1, hlm 71-80
- Susanto. 2012. Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat Public Perception on Underage Marriage Practice in Sukabumi, West Jawa *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3 No. 2, hlm 191-209
- Skripsi**
- Kristarina, N. (2019). Upaya UNICEF dalam Menangani Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2016-2018. Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Nugroho, Putranto Cahyo.(2017). Advokasi PLAN International dalam Malnutrisi di Sikka, Nusa Tenggara Timur. Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prameswari, A. (2019). Implemetasi Program “Yes I Do” PLAN International dalam Mengurangi Perkawinan Anak di Lombok Barat. Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Laporan
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , UNICEF, dan PUSKAPA, 2020. Laporan: Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.
- BAPPENAS dan KEMENPPPA. 2020. Laporan: Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
- International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2006. Laporan: Ending child marriage: a guide for global policy action.
- KOMNAS PEREMPUAN. 2017. Catatan Tahunan (CATAHU) 2017.
- PLAN Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia. 2021. Laporan: Perkawinan Bukan untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Pasca Perubahan UU Perkawinan.
- PLAN International, 2020. Laporan: PLAN International Worldwide Annual Review 2020.
- PLAN International Indonesia. 2020. Laporan Project Yes I Do (2017-

- 2020) oleh PLAN International Indonesia Kabupaten Sukabumi
- PLAN International, 2021. Laporan: PLAN International Worldwide Annual Review 2021.
- Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Gender, Universitas Indonesia, 2016. Laporan Penelitian: Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- UNICEF dan Badan Pusat Statistik. 2015. Laporan: Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia
- UNICEF, BPS, PUSKAPA, Kementrian PPN/Bappenas, dan Universitas Indonesia. 2020. Laporan: Perkawinan Anak di Indonesia.
- UNICEF. 2016. Laporan: SEBUAH GAMBARAN: SDG DAN ANAK-ANAK DI INDONESIA
- UNICEF. 2020. Laporan: Perkawinan Usia Anak di Indonesia.
- Yayasan PLAN International Indonesia. 2021. Policy Brief: Strategi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak: Kajian Pasca Revisi UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan.
- Yes I Do. 2016. Baseline Report: Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia.
- Yes I Do. 2018. Midline Report: Situasi Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, dan Sunat Perempuan di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat.
- Yes I Do. 2020. End-line Report: Progress on Child Marriage, but Unease about Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Cutting.
- Mayang R. Joseph N. Fajar R. 2013. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia, in Child Poverty and Social Protection Conference, pp. 1–27
- Berita**
- ANTARA NEWS: “Plan: Tingkatkan kesetaraan bagi anak perempuan di Hari Perempuan”, diakses di <https://www.antaranews.com/berita/2743449/plan-tingkatkan-kesetaraan-bagi-anak-perempuan-di-hari-perempuan-pada-10-Maret-2022>.
- CNN Indonesia: “Melihat Lebih Dekat Pernikahan Anak di Jawa Barat”, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat-pada-30-Desember-2021>.
- KEMENPPPA: “Perkuat Koordinasi, Untuk Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/413/perkuat-koordinasi-untuk-peningkatan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pada-12-Maret-2022>.
- KOMNAS PEREMPUAN: Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> pada 11 April 2022.
- KOMPAS: “Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia”, diakses dari

- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia> pada 30 Oktober 2021.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi: “WABUP ; PROGRAM YES I DO, PENUHI INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK”, diakses di <https://sukabumikab.go.id/web/b/3046.asp> pada 14 April 2022.
- Situs Web**
- Anwar, Sri Danti. KEMENPPPA: Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak, diakses dari <https://kajiangender.sksg.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-1-pembukaan-Sri-Danti-Anwar-1.pdf>
- GILRS NOT BRIDES: “About Child Marriage”, diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/> pada 01 September 2021.
- ICJR: “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” diakses dari <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> pada 06 Desember 2021.
- KEMENKUMHAM: “Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia” diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia> pada 06 Desember 2021.
- KOMPASIANA: “Gerakan Pencegahan Pernikahan Dini”, diakses di <https://www.kompasiana.com/fabianzahlu150901/60ac6dff10122842f5634e62/gerakan-pencegahan-pernikahan-dini> pada 07 Maret 2022.
- PLAN International: “Education”, diakses di <https://PLAN-international.org/quality-education> pada 03 Maret 2022.
- PLAN International: “Ending Violence”, diakses di <https://PLAN-international.org/ending-violence> pada 06 Maret 2022.
- PLAN International: “Our History” diakses dari <https://PLAN-international.org/organisation/history> pada 06 Oktober 2021.
- PLAN International: “The Organization” diakses dari <https://PLAN-international.org/organisation> pada 06 Oktober 2021.
- PLAN International: “Our Governance”, diakses di <https://PLAN-international.org/organisation/structure/governance> pada 17 Februari 2022.
- PLAN International: “Our Structure”, diakses di <https://PLAN-international.org/organisation/structure> pada 06 Maret 2022.
- PLAN International: “Sexual Health and Rights”, diakses di <https://PLAN-international.org/sexual-health> pada 04 Maret 2022.
- PLAN International: “Skills and Work”, diakses di <https://PLAN-international.org/skills-and-work> pada 06 Maret 2022.
- PLAN International UK: “Working with young people”, diakses di <https://PLAN-uk.org/about/working-with-young-people/youth-advisory-panel> pada 01 Maret 2022.
- PLAN International: “Youth Activism”, diakses di <https://PLAN-international.org/youth-activism> pada 03 Maret 2022.
- Rutgers WPF Indonesia: “Siapa Kami” diakses di <https://rutgers.id/tentang-kami/siapa-kami/> pada 06 Oktober 2021.
- Rutgers WPF Indonesia: “Yes I Do” diakses di <https://rutgers.id/program/yes-i-do/> pada 02 September 2021.
- Rutgers WPF Indonesia: “Mengurangi Angka Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja dan Sunat Perempuan” di Kabupaten

Sukabumi”, diakses di <https://rutgers.id/2018/04/10/mengurangi-angka-perkawinan-anak-kehamilan-remaja-dan-sunat-perempuan-di-kabupaten-sukabumi/> pada 15 Juni 2022.

UNICEF: “Child Marriage”, diakses di <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> pada 01 September 2021.

UNICEF: “Harmful Practices and Intimate Partner Violence”, diakses dari <https://data.unicef.org/topic/gender/harmful-practices-and-intimate-partner-violence/> pada 01 September 2021.

UNICEF: “Konvensi Hak Anak”, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada 01 September 2021.

Yayasan PLAN International Indonesia: “Apakah Yayasan Plan International Indonesia adalah lembaga resmi yang terdaftar di Indonesia?”, diakses di <https://plan-international.or.id/id/faq/> pada 10 Maret 2022.

Yayasan PLAN International Indonesia: “Bagaimana Kami Menggalang Dana”, diakses di <https://plan-international.or.id/id/bagaimana-kami-menggalang-dana/> pada 10 Maret 2022.

Yayasan PLAN International Indonesia: “Girls Get Equal”, diakses di <https://plan-international.or.id/id/girls-get-equal/> pada 11 Maret 2021.

Yayasan PLAN International Indonesia: “Profil Kami” diakses di <https://PLAN-international.or.id/id/tentang-PLAN/#profil> pada 06 Oktober 2021.

Yayasan PLAN International Indonesia: “Visi Misi” diakses di <https://PLAN-international.or.id/id/tentang->

PLAN/#visi-misi pada 06 Oktober 2021